

BAB III

MONOGRAFI KECAMATAN PADANG GELUGUR, KABUPATEN PASAMAN, PROVINSI SUMATERA BARAT

3.1. Sejarah dan Perkembangan Kecamatan Padang Gelugur

Kecamatan Padang Gelugur merupakan salah satu wilayah administratif yang berada dalam lingkup Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, yang memiliki posisi geografis yang cukup strategis. Jika dilihat secara astronomis, kawasan ini terletak di antara 00° 28' sampai dengan 00° 23' Lintang Utara serta berada pada 100° 01' hingga 100° 09' Bujur Timur. Dengan total luas mencapai sekitar 178,40 kilometer persegi, Kecamatan Padang Gelugur memiliki cakupan wilayah yang cukup besar dan heterogen, baik dari segi topografi maupun demografi.

Secara administratif, wilayah Kecamatan Padang Gelugur berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan lainnya, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Rao Selatan, di bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Panti, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Duo Koto, dan di bagian timur bersinggungan langsung dengan Kecamatan Mapat Tunggul Selatan. Batas-batas tersebut menjadikan Kecamatan Padang Gelugur sebagai daerah yang cukup vital karena menjadi jalur penghubung antar wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman.

Salah satu ciri khas sistem pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat adalah penggunaan istilah "Nagari" sebagai unit pemerintahan setelah tingkat kecamatan. Hal ini berbeda dengan banyak provinsi lain di Indonesia yang menggunakan istilah "desa". Konsep nagari merujuk pada sistem pemerintahan lokal tradisional Minangkabau yang memiliki struktur sosial dan budaya tersendiri. Dalam hal ini, Kecamatan Padang Gelugur terdiri atas empat nagari definitif, yaitu: Nagari Padang Galugua, Nagari Bahagia Padang Galugua, Nagari Sitombol Padang Galugua, dan Nagari Sontang Cubadak. Jika

dilihat dari segi kondisi geografis dan iklim, Nagari Padang Gelugur berada pada ketinggian antara 250 hingga 1.220 meter di atas permukaan laut. Daerah ini memiliki suhu rata-rata harian berkisar antara 29°C hingga 34°C, tergolong iklim tropis dengan variasi suhu yang cukup tinggi. Topografi wilayah ini terdiri atas dataran rendah hingga perbukitan, yang menjadikannya cocok untuk kegiatan pertanian dan pemukiman. Sementara itu, curah hujan yang tercatat rata-rata berkisar antara 15 hingga 30 mm per tahun, serta memiliki sistem irigasi teknis seluas kurang lebih 1.864 hektar yang menunjang aktivitas pertanian masyarakat.

Secara alami, wilayah Nagari Padang Gelugur dilintasi oleh dua aliran sungai yang cukup penting, yaitu Sungai Batang Sibinail dan Sungai Asik, yang mengalir dari arah utara menuju selatan. Sungai-sungai ini tidak hanya berperan sebagai sumber irigasi lahan pertanian, tetapi juga masih dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk keperluan MCK (mandi, cuci, kakus), mencerminkan pola pemanfaatan sumber daya alam yang bersifat tradisional namun masih bertahan hingga saat ini. Pola pemukiman yang ada di wilayah ini juga menunjukkan karakter khas kawasan yang berbasis pada kehidupan sosial yang komunal dan agraris. Jika menelusuri latar belakang historis terbentuknya Kecamatan Padang Gelugur, masyarakat lokal memiliki cerita turun-temurun mengenai asal usul nama daerah ini. Konon pada zaman dahulu, daerah ini dikenal sebagai wilayah yang banyak ditumbuhi pohon asam gelugur yang rimbun dan tumbuh subur di antara padang ilalang yang luas. Dari kondisi alam inilah masyarakat setempat secara kolektif menyepakati untuk menamakan wilayah ini sebagai "Padang Gelugur", sebagai cerminan identitas lokal yang diambil dari kekayaan alam setempat.

Pada masa kolonial Hindia Belanda, struktur pemerintahan lokal di wilayah ini dikenal dengan sebutan "Lareh Padang Gelugur", yang dikepalai oleh seorang pejabat adat bergelar "Tengku Lareh". Seiring berjalannya waktu, sistem ini mengalami transformasi. Pemerintahan Lareh kemudian digantikan oleh struktur baru yang disebut "Penghulu", dengan pemimpinnya yang diberi

gelar "Penghulu Paloh". Pada masa itu, jabatan Penghulu Paloh pernah dijabat oleh tokoh adat yang dikenal dengan nama Mangkuto. Dalam sistem pemerintahan modern, struktur pemerintahan tersebut kini telah bertransformasi menjadi sistem Wali Nagari yang dibantu oleh Sekretaris Nagari, Wali Jorong, dan perangkat nagari lainnya. Dalam aspek administratif lebih lanjut, Kecamatan Padang Gelugur terdiri dari 14 jorong, yang merupakan unit pemerintahan paling kecil setelah nagari. Nagari Padang Galugua mencakup dua jorong, yaitu Jorong Sentosa dan Jorong Makmur. Nagari Bahagia Padang Galugua memiliki empat jorong, yaitu Jorong Durian Kadap, Jorong Tanjung Aro Utara, Jorong Tanjung Aro Selatan, dan Jorong Pegang. Nagari Sitombol Padang Galugua terdiri dari empat jorong pula, yakni Jorong Simpang Tigo, Selamat Utara, Selamat, dan Selamat Selatan. Sementara itu, Nagari Sontang Cubadak memiliki empat jorong yang mencakup Jorong Sontang, Murni Sontang, Rambah, dan Binubu Kubu Gadang.

Keberadaan jorong-jorong ini menunjukkan struktur sosial pemerintahan yang masih mempertahankan unsur tradisional dan adat istiadat Minangkabau dalam praktik pemerintahan modern. Dengan demikian, Kecamatan Padang Gelugur tidak hanya penting dari sisi administratif dan geografis, namun juga menyimpan nilai historis, budaya, dan sosial yang mencerminkan kekayaan warisan masyarakat Minangkabau. Perpaduan antara sistem adat dan pemerintahan modern di wilayah ini menjadi cerminan dari fleksibilitas masyarakat lokal dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tanpa harus kehilangan jati diri dan nilai-nilai tradisional yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Gambar 1: Peta Kecamatan Padang Gelugur



Sumber: *OpenstreetMap*

Nagari padang Gelugur memiliki visi dan misi yaitu sebagai berikut:

Visi: untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan berkeadilan.

Misi:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kualitas sumber daya manusia, berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
2. Menyelenggarakan tata pemerintahan nagari yang baik dan bersih, menegakkan supremasi hukum, dan peningkatan pelayanan umum terhadap masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya manusia melalui aparat pemerintah nagari.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasiskan ekonomi kerakyatan, menciptakan lapangan kerja, serta mengelola sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan keharmonisan dalam tata kehidupan sosial budaya masyarakat dengan prinsip keadilan dan kebersamaan.

Berdasarkan ketentuan hukum yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 mengenai Ketentuan Pokok

Pemerintahan Nagari, serta diperkuat dengan regulasi lanjutan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari, maka terbukalah jalan bagi restrukturisasi sistem pemerintahan di wilayah Kecamatan Padang Gelugur. Regulasi ini mengatur dan menegaskan transisi kelembagaan dari struktur pemerintahan desa menjadi sistem pemerintahan nagari yang mengacu pada nilai-nilai adat dan budaya lokal Minangkabau. Sebelum adanya perubahan sistem pemerintahan tersebut, wilayah yang kini dikenal sebagai Nagari Padang Gelugur terdiri atas empat desa terpisah. Namun, seiring diberlakukannya peraturan daerah yang baru, keempat desa tersebut kemudian dilebur dan disatukan menjadi satu entitas pemerintahan yang disebut Nagari Padang Gelugur. Proses penggabungan ini dilakukan tidak hanya untuk mengefektifkan tata kelola pemerintahan lokal, tetapi juga untuk mengembalikan semangat kedaulatan lokal yang berbasis adat Minangkabau yang telah lama melekat dalam sistem sosial masyarakat setempat.

Seiring dengan terbentuknya pemerintahan nagari tersebut, diselenggarakan pula pemilihan Wali Nagari sebagai pemimpin eksekutif yang sah di tingkat pemerintahan nagari. Dalam pemilihan umum nagari yang pertama kali diselenggarakan, masyarakat secara demokratis memilih Adri Umar, S.Pd. sebagai Wali Nagari pertama Nagari Padang Gelugur. Beliau terpilih untuk menjabat dalam periode lima tahun pertama setelah pembentukan nagari, dan selama masa kepemimpinannya beliau mengemban amanah masyarakat dalam mengawal transisi pemerintahan dari sistem desa menuju sistem nagari yang berbasis adat, hukum positif, serta aspirasi lokal. Pemerintahan Nagari Padang Gelugur yang berlandaskan pada prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah terus berkembang dalam tatanan kelembagaan dan pelayanan publik. Hingga saat ini, posisi Wali Nagari Padang Gelugur masih dijabat oleh Wali Nagari yang melanjutkan estafet kepemimpinan dari masa sebelumnya, yang bertugas mengelola roda pemerintahan, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan,

serta memastikan bahwa setiap kebijakan lokal selaras dengan nilai-nilai adat, hukum negara, dan norma agama yang menjadi fondasi masyarakat Minangkabau. Pemerintahan Nagari Padang Gelugur sampai saat ini masih dijabat oleh Wali Nagari yaitu:

Table 3.1

No.	Nama Lengkap	Masa Jabatan
1.	Maksum	1945
2.	Ali (Tuan Marajo)	Tidak diketahui
3.	Wali Umar	Tidak diketahui
4.	Lamid Rj. Lelo	Tidak dikethui
5.	Dt. Bonsu	Tidak diketahui
6.	Kali Aris	Tidak diketahui
7.	Malik	Tidak diketahui
8.	Wali Bahar Rj. Nan Bumi	Tidak diketahui
9.	Wali Nur	Tidak diketahui
10.	Wali Tiar	Tidak diketahui
11.	Adri Umar, S.Pd.	2001 - 2006
12.	Asrial Arpani Hasan, S.STP.	2006 - 2007
13.	Yaulfahri	2008 - 2009
14.	Tasrin Yules, S.H.	2009 - 2010
15.	Khairul Sani	2010 - 2011
16.	Saharuddin MDH	2011- 2013
17.	Jendrizon Hasan	2013 - 2015
18.	Altasman	2015 - 2017
19.	Busri	2017 - 2022
20.	Dirman	2022 –sampai sekarang

Sumber: Sekretaris Nagari Kecamatan Padang Gelugur

3.2. Penduduk Kecamatan Padang Gelugur

Penduduk merupakan komponen fundamental dalam sistem sosial dan pembangunan suatu wilayah. Keberadaan dan dinamika penduduk menjadi indikator penting yang tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Dalam kerangka pembangunan daerah, jumlah dan kualitas penduduk dianggap sebagai sumber daya utama (human capital) yang menentukan arah, kecepatan, serta keberhasilan suatu program pembangunan baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya maupun lingkungan. Oleh karena itu, memahami karakteristik penduduk suatu wilayah secara mendalam merupakan langkah awal yang sangat strategis dalam menyusun kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Data kependudukan sendiri merujuk pada kumpulan informasi statistik yang menggambarkan kondisi demografis masyarakat di suatu wilayah dalam periode tertentu. Informasi ini meliputi jumlah penduduk secara keseluruhan, distribusi penduduk menurut kelompok usia dan jenis kelamin, status pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat kesehatan, kondisi perumahan, serta karakteristik sosial-ekonomi lainnya. Analisis terhadap data kependudukan menjadi penting karena dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai potensi dan tantangan yang dimiliki oleh suatu daerah dalam mengembangkan sektor-sektor kehidupan masyarakat (Hakim et al., 2024).

Salah satu instrumen utama dalam memperoleh data kependudukan yang valid dan sistematis adalah sensus penduduk, yaitu kegiatan pendataan yang dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh individu yang bertempat tinggal di wilayah tertentu. Di Indonesia, pelaksanaan sensus penduduk dilakukan secara rutin setiap sepuluh tahun sekali dan telah berlangsung sebanyak tujuh kali sejak kemerdekaan, yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, dan yang terbaru pada tahun 2020. Enam sensus pertama dilakukan dengan metode konvensional, yakni petugas datang langsung ke setiap rumah untuk mencatat data penduduk satu per satu secara manual. Namun pada Sensus Penduduk 2020 (SP2020) terjadi inovasi metodologis

dengan menerapkan metode kombinasi, yaitu integrasi antara data administrasi kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, dengan verifikasi langsung melalui survei lapangan. Pendekatan ini dinilai lebih efisien dan akurat dalam merepresentasikan data demografis nasional, termasuk data pada tingkat kecamatan. Adapun menurut data resmi yang dirilis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman tahun 2023, jumlah total penduduk yang bermukim di wilayah Kecamatan Padang Gelugur tercatat sebanyak 33.932 jiwa. Jumlah ini terdiri dari 16.913 jiwa penduduk laki-laki dan 17.019 jiwa penduduk perempuan, sehingga menghasilkan rasio jenis kelamin sebesar 99,38, yang artinya jumlah laki-laki hampir seimbang dengan jumlah perempuan. Rasio ini juga menunjukkan bahwa tidak terdapat dominasi mencolok antara jenis kelamin, yang bisa menjadi indikator stabilitas sosial dari aspek gender.

Dalam konteks ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi, penduduk umumnya diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja merupakan mereka yang berada dalam rentang usia produktif, yaitu 15 tahun ke atas, yang secara potensial dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik yang sedang aktif bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Berdasarkan data tahun 2023, jumlah penduduk usia kerja di Kecamatan Padang Gelugur mencapai 24.889 orang, yang menandakan bahwa sebagian besar populasi memiliki potensi untuk diberdayakan dalam sektor produksi dan layanan. Sementara itu, penduduk yang tergolong bukan usia kerja (di bawah 15 tahun atau lanjut usia) berjumlah 9.043 jiwa, yang umumnya terdiri dari anak-anak, pelajar, lansia, serta kelompok lain yang tidak tergolong dalam kategori produktif. Jumlah ini tetap harus menjadi perhatian dalam perencanaan sosial karena kelompok ini tergolong sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan dan pelayanan sosial, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.

Secara umum, komposisi penduduk Kecamatan Padang Gelugur mencerminkan struktur demografi yang cukup seimbang dan menjanjikan bagi pengembangan sumber daya manusia. Dengan mayoritas penduduk berada dalam usia kerja produktif, daerah ini memiliki peluang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat pembangunan masyarakat apabila ditunjang oleh kebijakan pemerintah yang tepat sasaran dalam bidang pendidikan, pelatihan kerja, pemberdayaan ekonomi lokal, serta infrastruktur sosial dasar.

3.3. Sosial dan Kesejahteraan Kecamatan Padang Gelugur

Pembangunan sosial di suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari aspek pendidikan, karena pendidikan merupakan salah satu fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, sejahtera, dan berdaya saing. Sistem pendidikan nasional di Indonesia secara yuridis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa pendidikan nasional diselenggarakan melalui tiga jalur, yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Ketiga jalur ini saling melengkapi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Pendidikan formal meliputi jenjang pendidikan yang terstruktur dan berjenjang mulai dari pendidikan dasar (seperti Sekolah Dasar dan sederajat), pendidikan menengah (SMP/MTs dan SMA/SMK/MA), hingga pendidikan tinggi (universitas dan akademi). Adapun jenis pendidikan dalam jalur formal mencakup berbagai disiplin, seperti pendidikan umum, kejuruan, vokasi, akademik, keagamaan, profesi, hingga pendidikan khusus. Sementara itu, pendidikan nonformal lebih ditujukan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh pendidikan formal, seperti kursus dan pelatihan. Sedangkan pendidikan informal lebih banyak berlangsung

dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, melalui pembelajaran secara mandiri.

Jika kita meninjau dari aspek ketersediaan sarana pendidikan di Kecamatan Padang Gelugur, maka terlihat bahwa upaya penyediaan fasilitas pendidikan dasar hingga menengah telah dilakukan meskipun masih terdapat keterbatasan, terutama di jenjang pendidikan menengah. Berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman, pada periode tahun 2021 hingga 2023 tidak terdapat penambahan signifikan terhadap jumlah nagari yang dilengkapi fasilitas pendidikan menengah, baik itu Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di beberapa nagari masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan lanjutan, yang dapat berdampak terhadap tingkat pendidikan dan kesejahteraan jangka panjang.

Adapun data terkini mengenai jumlah satuan pendidikan di Kecamatan Padang Gelugur pada tahun 2023 menunjukkan bahwa wilayah ini telah memiliki sejumlah lembaga pendidikan dari berbagai jenjang sebagai berikut:

Table 3.2

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	12
2.	Sekolah Dasar (SD)	27
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	4
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	4

Sumber: Kecamatan Padang Gelugur dalam Angka 2024.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan dasar di Kecamatan Padang Gelugur telah cukup merata, ditunjukkan oleh jumlah SD yang cukup besar dan tersebar di berbagai nagari. Namun, untuk jenjang SMP dan SMA, jumlah satuan pendidikan masih relatif terbatas dibandingkan luas

wilayah dan jumlah penduduk. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah yang tinggal di wilayah terpencil atau sulit dijangkau, yang mungkin harus menempuh jarak jauh untuk melanjutkan pendidikan menengah.

Selain aspek pendidikan, indikator kesejahteraan masyarakat juga dapat diukur melalui keterjangkauan terhadap layanan dasar lainnya, seperti kesehatan, transportasi, dan fasilitas umum. Namun, pendidikan tetap menjadi salah satu tolok ukur utama dalam pembangunan sosial karena mempengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga untuk mendukung peningkatan akses, mutu, dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Kecamatan Padang Gelugur demi mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan berpendidikan.

Sejak tahun 2019 hingga 2023 hanyaterdapat 1 puskesmas di Kecamatan Padang Gelugur. Sedangkan fasilitas Kesehatan lainnya yang terdapat di Kecamatan Padang Gelugur adalah posyandu, dan polindes, yang mana jumlahnya masing-masing adalah 31 unit dan 4 unit pada tahun 20203. Berdasarkan data Potensi Desa (Podesi), mayoritas keluarga di Kecamatan Padang Gelugur dari tahun 2019 hingga 2021 menggunakan sumur sebagai sumber air minum mereka. Kemudian, pengguna listrik di Kecamatan Padang Gelugur semuanya sudah menggunakan listrik dari PLN yaitu sebanyak 9.225 keluarga.

Jumlah masjid di Kecamatan Padang Gelugur tahun 20204 sebanyak 66 unit yang tersebar di semua nagari, yaitu 34 masjid di Nagari Padang Gelugur, 13 masjid di Nagari Bahagia Padang Gelugur, 9 masjid di Nagari Sitombol Padang Gelugur,, dan 10 masjid di Nagari Sintang Cubadak. Musholla di Kecamatan Padang Gelugur tahun 2024 juga tersebar di semua Nagari dengsn musholla paling banyak terdapat pada Nagari Padang Gelugur dengan 24

musholla, sedangkan musholla paling sedikit terdapat pada Nagari Sontang Cubadak dengan 6 musholla.

3.4. Kondisi Angkutan Becak Motor di Kecamatan Padang Gelugur

Angkutan becak motor di Kecamatan Padang Gelugur merupakan salah satu transportasi yang banyak digunakan di daerah setempat. Kecamatan Padang Gelugur memiliki jumlah becak motor yang tergolong cukup banyak, sehingga menjadi salah satu pilihan utama bagi masyarakat untuk berpergian sehari-hari. Becak motor di Kecamatan Padang Gelugur ini adalah sebuah kendaraan yang mengangkut penumpang.

Angkutan becak motor di Kecamatan Padang Gelugur sudah ada sejak dulu, namun pada saat itu angkutan becak motor ini masih tergolong sedikit dan tidak banyak dipergunakan oleh masyarakat untuk kendaraan umum. Sekarang angkutan becak motor sudah banyak digunakan oleh masyarakat setempat untuk kendaraan umum. Dengan angkutan becak motor ini juga masyarakat menjadi mudah untuk berpergian, akan tetapi angkutan becak motor ini masih sangat minim dalam mematuhi aturan berlalu lintas, sehingga pernah terjadi kecelakaan yang di akibatkan becak motor ini sudah tidak layak digunakan untuk beroperasi di jalan raya tetapi masih dipergunakan oleh pengemunya.

Angkutan becak motor di Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman yang tidak mematuhi aturan berlalu lintas yang disebabkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Angkutan becak motor ini sering kali tidak mematuhi aturan dalam berlalu lintas, sehingga dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang, dan pengguna jalan raya. Angkutan becak motor di Kecamatan Padang Gelugur tergolong cukup banyak, sebagaimana yang telah saya amati langsung ada kurang lebih 150 angkutan becak motor yang beroperasi di jalan raya. Oleh karena itu, dengan banyaknya angkutan becak motor di Kecamatan Padang Gelugur harus

mematuhi aturan dalam berlalu lintas supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.

Becak motor di Kecamatan Padang Gelugur ini merupakan angkutan jalan yang menggunakan jalan raya, sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya bagi setiap angkutan jalan yang beroperasi di jalan raya itu wajib untuk mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Becak motor di sini khususnya banyak ditemukan pada pasar-pasar yang ada di Kecamatan Padang gelugur, becak motor tersebut parkir sembarangan di tepi jalan raya sehingga mengganggu pengendara lain untuk berlalu lintas. Rata-rata becak motor yang ada di Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat ini juga tidak menggunakan kaca spion, motor mati pajak, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Dengan melihat kondisi becak motor di Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat hal ini perlu diperhatikan karena banyak angkutan becak motor tidak mematuhi peraturan lalu lintas pada saat berkendara, yang mana becak motor ini membawa penumpang. Oleh karena itu, seharusnya pengemudinya harus menjaga keselamatan para penumpang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.

Gambar 2: Foto Angkutan Becak Motor



Sumber: Dokumentasi pribadi